

Analisis Anggaran Pendidikan Provinsi Jambi

Azwan, M. Surya Hidayat, Syamsuddin

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstract. Education was essentially non-discriminatory. Education is for all the children of the nation. If there are people who can not get an education, especially basic education of nine years, it is the duty of the government to take action so that no more children of school age are not in school. With the enactment of the nine-year compulsory education program means all Indonesian children nine years of compulsory schooling and compulsory funded by the government. The government has set the education budget is allocated 20% of the APBN or APBD. The case study is the achievement of 20% was never achieved in the education budget in Jambi Province despite budget each year tends to increase. The purpose of this study was to analyze the proportion of the education budget Jambi formula comparison, how big the proportion and deconcentration progress with the development of the formula, is there a relationship between the increase in the education budget with APM and APK with pearson product moment correlation formula and how big the budget needs field education for 8 years to come up with a method of exponential trend. The research yielded information that the average proportion of education budgets to the provincial budget over a period of 12 years by 7,6 percent, and the proportion of development deconcentration lowest occurred in 2010 of 21,3 percent and the largest occurred in 2012 amounted to 228,5 percent, the significance of the correlation results turned out to be the APBN/APBD with APM SD, APK SMP and APK SMA were not significant, while the correlation/relationship between the APBN/APBD with APM SD, APK SMP and APK SMA are very strong while the estimated growth of the education budget in Jambi Provincial APBD for 7 years on average amounted to 23,2 percent.

Keywords: education budget, deconcentration, nine-year compulsory education program

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktifitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumberdaya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Pendidikan tidak cukup hanya dikelola oleh pemerintah sendiri. Perlu ada kemitraan antara masyarakat, keluarga dan

sekolah. Melalui konsep kemitraan dalam bidang pendidikan akan terjadi simbiosis mutualisme segitiga. Biaya pendidikan tidak hanya berasal dan bersumber dari pemerintah saja akan tetapi dapat bersumber dari individu seseorang, lembaga swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau bahkan berasal dari luar negeri. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat biasanya semakin tinggi pula tingkat kesadarannya terhadap pentingnya pendidikan. Permasalahannya adalah bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi yang berdampak terhadap proses pendidikan. Perlu kebijakan yang jelas dan realistis agar pendidikan dapat dinikmati

oleh semua peserta didik untuk semua kelas ekonomi.

Anggaran dan pembiayaan pemerintah yang rendah dalam bidang pendidikan dikhawatirkan akan semakin meningkatkan kesenjangan siswa berdasarkan status sosio-ekonomi. Siswa-siswi dari keluarga miskin yang mendapat subsidi pemerintah tidak akan mampu menanggung kekurangan biaya sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah belum atau tidak standar nasional. Sementara itu, siswa-siswi dari kelas menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana memadai. Selanjutnya, karena sekolah-sekolah ini mendapat iuran pendidikan memadai dari siswa, sekolah-sekolah tersebut akan mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu pendidikan.

Pendidikan pada dasarnya tidak diskriminatif. Pendidikan adalah untuk semua anak bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa maka semakin maju dan sejahtera bangsa tersebut. Maka adalah kewajiban pemerintah untuk mengambil tindakan agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah. Dengan ditetapkannya program wajib belajar sembilan tahun itu artinya semua anak Indonesia wajib sekolah sembilan tahun dan wajib dibiayai oleh pemerintah.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan antara lain adalah Pertama, "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Kedua, "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Ketiga, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Keempat, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap

warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun".

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis proporsi anggaran pendidikan Provinsi Jambi; (2) Menganalisis proporsi dan perkembangan dana dekonsentrasi terhadap pembiayaan sektor pendidikan di Provinsi Jambi selama periode 2005-2012; (3) Menganalisis hubungan antara peningkatan anggaran pendidikan dengan APM dan APK; (4) Menganalisis kebutuhan anggaran bidang pendidikan selama 8 tahun yang akan datang, tahun 2013-2020.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan berupa data runtut waktu (time series) dari tahun 2000-2012 yang merupakan data dari Dinas Pendidikan, Bappeda, Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi dan Balitbangda Provinsi Jambi.

Jenis data yang digunakan adalah (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi. (3) Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. (4) Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. (5) Master Plan Pendidikan Provinsi Jambi. (6) Angka Partisipasi Murni (APM) dan (7) Angka Partisipasi Kasar (APK), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

Alat Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis yaitu:

1. Model proporsi atau kontribusi untuk melihat seberapa besar proporsi anggaran pendidikan dikaitkan dengan ketentuan undang-undang nomor 20

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan rumus sebagai berikut :

$$Pe = \frac{\sum APt}{\sum APBDt} \times 100\%$$

Keterangan :

Pe = Proporsi APBD Pendidikan

APt = Jumlah Anggaran Pendidikan Pada Tahun t

APBDt = Jumlah Anggaran Pendidikan Pada Tahun t setelah dikalikan 20% dari APBD tahun t

2. Untuk melihat proporsi dan perkembangan dana dekonsentrasi terhadap pembiayaan sektor pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selama 8 tahun terakhir digunakan rumus sebagai berikut :

$$Pe = \frac{\sum ABPnt}{\sum APBDt} \times 100\%$$

Keterangan :

Pe = Proporsi dana dekon terhadap anggaran pendidikan

Pt apbn = Jumlah Anggaran Pendidikan pada APBN Tahun t

Pt apbd = Jumlah Anggaran Pendidikan pada APBD Tahun (t-1)

Sedangkan rumus perkembangan adalah

$$Pt = \frac{Pt - Pt-1}{Pt-1} \times 100\%$$

Keterangan :

Pt = Jumlah Anggaran Pendidikan Pada Tahun t

Pt-1 = Jumlah Anggaran Pendidikan Pada Tahun t-1

3. Untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu hubungan antara peningkatan anggaran pendidikan dengan APK dan APM. Maka digunakan analisis korelasi dengan persamaan korelasi yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Korelasi *pearson product moment* dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai

r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = +1 berarti korelasi sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r.

4. Untuk menganalisis kebutuhan anggaran bidang pendidikan selama 8 tahun yang akan datang, tahun 2013-2020. Digunakan pendekatan metode trend eskponensial. Trend ini digunakan karena nilai standar error yang dihasilkan dari estimasi sangat kecil yaitu mendekati 0.

Trend eksponensial adalah suatu bentuk persamaan yang bukan dalam bentuk garis lurus berbentuk $Y' = a \cdot b^x$. Persamaan ini dapat dirubah dalam bentuk persamaan garis lurus dengan cara melakukan logaritma pada kedua bagian persamaan sehingga menjadi :

$$\log Y' = \log a + \log bX$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proporsi Anggaran Pendidikan Provinsi Jambi

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah administrasi adalah tingkat pendidikan dari penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk yang ada maka semakin berhasil pembangunan yang dilaksanakan. Selain merupakan indikator dalam pembangunan, pendidikan juga merupakan kunci utama dalam menggerakkan pembangunan karena pendidikan merupakan pondasi utama dalam proses pengembangan sumberdaya yang berujung menuju pengembangan pembangunan yang ada.

Melihat kondisi yang ada, maka pemerintah Provinsi Jambi mengambil beberapa kebijakan, diantaranya dengan mengembangkan tempat-tempat pendidikan, membuka sekolah-sekolah kejuruan baru, dan memberikan pelatihan-pelatihan yang direalisasikan dengan menambah dan

meningkatkan anggaran pembiayaan pendidikan yang ada.

Dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat yang ada maka pemerintah Provinsi Jambi menetapkan anggaran guna membiayai pendidikan tersebut. Alokasi penetapan anggaran pendidikan di Provinsi Jambi belum dapat memenuhi 20% dari APBD Provinsi Jambi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Seperti terlihat Tabel 1, dari periode tahun 2000 – 2012 alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan yang tinggi meskipun pada tahun 2008 adanya penurunan anggaran. Artinya pemerintah Provinsi Jambi sadar pentingnya pendidikan dalam membangun dan mengembangkan provinsi ini.

Tabel 1. Proporsi Anggaran Pendidikan Provinsi Jambi periode 2000-2012 (Rp Juta)

Tahun	APBD Prov. Jambi (Rp Juta)	APBD Pendidkn (Rp Juta)	Proporsi (%)
2000	163.276	8.005	4,9
2001	238.790	8.435	3,5
2002	374.520	9.329	2,5
2003	563.976	10.47	1,9
2004	592.722	12.248	2,1
2005	642.833	34.990	5,4
2006	1.156.840	82.998	7,2
2007	1.291.600	158.396	12,3
2008	1.429.180	136.730	9,6
2009	1.620.590	175.300	10,8
2010	1.504.930	186.741	12,4
2011	1.920.556	241.488	12,6
2012	2.283.531	299.368	13,1
Rata-rata			7,6

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Dari tabel 1 dapat dianalisis bahwa setelah diterbitkan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional proporsi pendanaan pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 12,41 persen dan tahun 2012 sebesar 13,11 persen. Sedangkan proporsi pendanaan pendidikan terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 2,07 persen.

Secara umum proporsi pendanaan pendidikan sejak tahun 2004-2010 cenderung naik kecuali pada tahun 2008 yang turun. Persentase anggaran pendidikan yang rendah tidak seperti yang diamanatkan dalam UU SPN sebesar 20% disebabkan oleh banyak hal antara lain adalah ketergantungan anggaran yang masih tinggi terhadap APBN, komponen gaji guru dan pelatihan kedinasan tidak dimasukkan serta masih relatif rendahnya SDM. Diharapkan dengan terbitnya PERDA No.4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (pendidikan bermutu) amanat UU SPN sebesar 20 persen akan dapat direalisasikan.

Sedangkan rata-rata proporsi APBD pendidikan terhadap APBD Provinsi selama kurun waktu 12 tahun sebesar 7,6 persen dimana proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 13,1 persen, proporsi APBD pendidikan terhadap APBD provinsi yang terendah terjadi pada tahun 2003 dimana jumlahnya sebesar 1,9 persen. Semakin tinggi persentase proporsi APBD pendidikan terhadap UU SPN 20% maka semakin baik porsi anggaran pendidikan tersebut. Sebelum diterbitkan UU SPN 20% periode 2000-2003 proporsi anggaran pendidikan Provinsi Jambi sangat rendah antara 1,9-2,9 persen. Setelah diterbitkan UU SPN 20% periode 2004-2012 proporsi anggaran pendidikan mulai terlihat ada peningkatan, walaupun tidak pernah mencapai 20% dari APBD total Provinsi Jambi yaitu antara 2,1-13,1 persen.

Rendahnya proporsi anggaran APBD pendidikan Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang SPN disebabkan masih fokusnya program pembangunan pada pengembangan infrastruktur. APBD Provinsi Jambi banyak terserap pada program infrastruktur dan sarana prasarana. Namun demikian ada kemauan dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus menambah proporsi APBD pendidikan terhadap UU SPN 20% agar mencapai 20%

seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

Proporsi dan Perkembangan Dana Dekonsentrasi

Seiring dengan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi yang terjadi saat ini maka pembangunan harus dilakukan dari berbagai sendi, agar pondasi dasar dari pembangunan tersebut benar-benar baik. Sehingga perkembangan pembangunan menjadi lebih kompleks dan kokoh untuk masa yang akan datang. Dalam rangka pembangunan tersebut maka upaya pemerintah adalah dengan menyisihkan dana dari APBN nya dalam bentuk dana dekonsentrasi, dimana dana tersebut khusus digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan sumberdaya manusia dan meningkatkan kualitas pendidikan diseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data yang ada seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Alokasi anggaran pendidikan melalui dana APBN selama 8 tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya akan tetapi proporsinya dilihat dari sisi APBD pendidikan Provinsi Jambi sangat fluktuatif, seperti pada tahun 2005 proporsi APBD pendidikan Provinsi Jambi terhadap APBN Dekon sebesar 46,2 persen, pada tahun 2006 turun menjadi sebesar 28,1 persen, pada tahun 2007 naik menjadi sebesar 74,3 persen, pada tahun 2008 turun menjadi sebesar 59,1 persen, pada tahun 2009 turun menjadi 33,0 persen, pada tahun 2010 turun menjadi sebesar 21,3 persen, pada tahun 2011 naik menjadi 95,4 persen dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi 228,5 persen.

Proporsi terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 228,5 persen dan proporsi terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 21,3 persen. Semakin besar proporsi APBD pendidikan Provinsi Jambi terhadap APBN Dekon, ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan pendidikan semakin tinggi, anggaran yang semakin

fokus dan indikator pelaksanaan pendidikan juga semakin jelas. Sebaliknya semakin rendah proporsi APBD pendidikan Provinsi Jambi terhadap APBN Dekon maka ini menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, program yang kurang fokus dan lemahnya indikator sebagai standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Tingginya proporsi APBD pendidikan Provinsi Jambi terhadap APBN Dekon pada tahun 2012 terjadi karena gaji guru sertifikasi khusus pegawai negeri sudah diserahkan kepada kabupaten/kota masing-masing oleh pemerintah pusat, adanya program satu milyar satu kecamatan (SAMISAKE), adanya program beasiswa S1, S2 dan S3 serta program percepatan pengembangan SMK dengan porsi perbandingan terhadap SMA sebesar 70 SMK : 30 SMA. Ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup besar karena pemerintah daerah belum mampu untuk membiayai guru, rehabilitasi sekolah, pendidikan khusus/layanan khusus, pembangunan fisik pendidikan dan biaya operasional sekolah.

Tabel 2. Proporsi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Jambi terhadap Dana Dekon periode 2005-2012 (Rp Juta)

Tahun	APBN (Dekon)	APBD Pendidikan	Proporsi Dana APBD (%)
2005	75.728	34.990	46,2
2006	294.970	82.998	28,1
2007	213.312	158.396	74,3
2008	231.241	136.730	59,1
2009	531.044	175.300	33,0
2010	876.409	186.741	21,3
2011	221.727	211.488	95,4
2012	109.561	299.368	228,5

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Data diolah)

Pada tabel di atas juga memperlihatkan bahwa proporsi APBD pendidikan Provinsi Jambi terhadap APBN dekonsentrasi terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 21,3 persen, sedangkan

anggaran terbesar APBN Dekon juga terjadi pada tahun 2010 sebesar 876,409 milyar. Demikian juga sebaliknya proporsi APBD pendidikan Provinsi Jambi terhadap APBN Dekon terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 228,5 persen, sedangkan anggaran terkecil APBN Dekon juga terjadi pada tahun 2012 sebesar 109,561 milyar.

Rendahnya proporsi APBD pendidikan Provinsi Jambi terhadap APBN Dekon menunjukkan masih kurang intensifnya koordinasi, komunikasi dan jaringan antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah Provinsi Jambi. Untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan membentuk jaringan dengan Kemendikbud RI diperlukan sumberdaya manusia yang kuat. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat merupakan kondisi logis dari APBD pendidikan Provinsi Jambi.

Program beasiswa yang sekarang sedang dilaksanakan merupakan langkah nyata dan tepat oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan sumberdaya manusia. Beasiswa diberikan kepada siapa saja putera Jambi baik sebagai PNS, Honor, Dosen, Mahasiswa reguler yang kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Program lain yang juga menunjang sumberdaya manusia adalah program SAMISAKE, melalui program ini anak usia sekolah SD, SMP dan SMA yang tidak mampu diberikan beasiswa sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Proporsi dana APBN Dekonsentrasi terhadap APBD Pendidikan di Provinsi Jambi yang berfluktuasi itu disebabkan oleh berbagai hal seperti karena adanya pengembalian uang gaji sertifikasi guru dari APBN Dekon kepada APBD kabupaten/kota daerah masing-masing yang jumlahnya sangat besar. Disamping itu penurunan jumlah anggaran dana pendidikan pada APBN Dekon sebagai akibat adanya pengurangan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah

Baru (USB) semua jenjang, pengurangan jumlah siswa penerima beasiswa serta terjadinya reformasi birokrasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hubungan Anggaran Pendidikan Dengan APM Dan APK

Peningkatan anggaran pendidikan setiap tahun untuk mencapai standar yang telah ditetapkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20 persen diyakini akan menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan. Untuk meningkatkan APM ataupun APK diperlukan berbagai perangkat sebagai pendorongnya. Tidak cukup hanya sekedar meningkatkan anggaran pendidikan saja.

Tabel 3. Pertumbuhan APM SD, APK SMP dan APK SMA Tahun 2005-2011

Tahun	APM SD(%)		APK SMP (%)		APK SMA (%)	
	Nilai	Pertmb	Nilai	Pertmb	Nilai	Pertmb
2005	83,20	-	72,20	-	41,68	-
2006	86,95	4,31	79,45	9,13	56,89	26,74
2007	92,02	5,51	89,36	11,09	60,73	6,32
2008	93,24	1,31	95,97	6,89	61,13	0,65
2009	98,71	5,54	95,25	-0,76	64,72	5,55
2010	98,72	0,01	96,17	0,96	69,82	7,31
2011	99,81	1,0	98,80	2,67	70,09	3,85

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Kenaikkan anggaran pendidikan setiap tahun baik melalui APBD pendidikan maupun APBN Dekon ternyata memang menaikkan APM dan APK kecuali terjadi pada tahun 2009 kenaikan anggaran pendidikan menurunkan pertumbuhan APK SMP sebesar -0,76 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3. Apabila dilihat pertumbuhan pertahun, pertumbuhan APM SD yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 5,54 persen, pertumbuhan APK SMP yang tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 11,09 persen sedangkan pertumbuhan APK SMA yang tertinggi terjadi pada tahun

2006 sebesar 26,74 persen. Dari kenaikan-kenaikan tersebut semua diiringi dengan kenaikan anggaran kecuali kenaikan APK SMP pada 2007 diiringi dengan penurunan pertumbuhan anggaran APBN Dekon sebesar -27,68 persen.

Tabel 4. Korelasi APBD dan APBN terhadap APM SD, APK SMP dan APK SMA

Korelasi Antar Variabel	APBD/APBN	Sig.
APM-SD	.564	.072
APK-SMP	.480	.114
APK-SMA	.579	.066

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Melalui analisis korelasi pada Tabel 4, hubungan antara APBD pendidikan dengan APM SD, APK SMP dan APK SMA sangat kuat. Hal ini ditunjukkan dengan Pearson Correlation yang lebih besar dari 0,5. Demikian juga hubungan antara APBN Dekon dengan APM SD, APK SMP dan APK SMA juga sangat kuat kecuali hubungan antara APBN Dekon dengan APK SMP relatif rendah atau kecil terlihat dari Pearson Correlation sebesar 0,480 yang berarti lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa hubungannya relatif rendah atau kecil.

Berdasarkan output tingkat signifikansi hasil korelasi terlihat bahwa besaran korelasi antara APBN/APBD dan APM-SD sebesar 0,072 yang berarti lebih besar dari $\alpha=0,10$ yang artinya signifikan. Signifikansi korelasi variabel APBN/APBD dengan APK-SMP sebesar 0,114 yang berarti lebih besar dari $\alpha=0,10$ yang artinya antara dua variabel ini tidak signifikan. Selanjutnya signifikansi korelasi variabel APBN/APBD dengan APK-SMA menunjukkan nilai sebesar 0,066 yang artinya lebih kecil dari $\alpha=0,10$ dan ini artinya antara dua variabel tersebut terdapat hubungan yang signifikan.

Kebutuhan Dan Estimasi Anggaran Pendidikan

Kebutuhan dan estimasi anggaran pendidikan selama delapan tahun mendatang dapat dikalkulasikan dengan

menggunakan pendekatan metode trend eksponensial yang berpedoman pada distribusi APBD dan APBN selama 8 tahun terakhir.

Tabel 5. Estimasi kebutuhan anggaran pendidikan melalui dana APBN dan APBD periode 2013-2020 (Rp Juta)

Tahun	Estimasi Anggaran Penddkn melalui APBN	Estimasi Anggaran Penddkn dalam APBD	Prtmbhn APBN (%)	Prtmbhn APBD (%)
2013	6.203.128	593.189	-	-
2014	11.910.006	871.988	92,0	47,0
2015	22.867.213	1.281.823	92,0	47,0
2016	24.493.237	1.429.933	7,1	11,6
2017	29.598.060	1.678.242	20,8	17,4
2018	34.702.882	1.926.550	17,3	14,8
2019	39.807.705	2.174.859	14,7	12,9
2020	44.912.527	2.423.167	12,8	11,4
Rata-rata			36,7	23,2

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan data yang ada, estimasi alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jambi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.281.823.000. Besarnya estimasi alokasi anggaran pendidikan ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Ini terbukti pada tahun 2019 estimasi kebutuhan anggaran pendidikan diperkirakan menjadi Rp.2.174.859.000. dan pada tahun 2020 sebesar Rp.2.423.167.000.

Dari tabel 5 terlihat besarnya estimasi kebutuhan alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jambi untuk delapan tahun ke depan melalui dana APBD. Pertumbuhan estimasi anggaran APBD tertinggi direncanakan terjadi pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sama sebesar 47,0 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah akan terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,4 persen.

Rata-rata pertumbuhan estimasi anggaran pendidikan pada APBD Provinsi Jambi selama 7 tahun adalah sebesar 23,2 persen. Sedangkan estimasi anggaran pendidikan melalui APBN terlihat peningkatan dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan estimasi anggaran APBN tertinggi direncanakan terjadi pada

tahun 2014 dan 2015 masing-masing sama sebesar 92,0 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah akan terjadi pada tahun 2016 sebesar 7,1 persen.

Rata-rata pertumbuhan estimasi anggaran pendidikan pada APBN selama 7 tahun adalah sebesar 36,7 persen. Ini artinya dengan melihat estimasi tersebut maka perkembangan pada dunia pendidikan dan peningkatan sumberdaya manusia sangat pesat perkembangannya.

Dari hasil estimasi kebutuhan anggaran pendidikan tersebut maka diderivasikan kepada kebutuhan-kebutuhan riil untuk pendidikan. Kebutuhan riil anggaran pendidikan di Indonesia untuk memenuhi hak pendidikan dasar dan menengah telah dihitung oleh BAPPENAS bekerjasama dengan UNICEP dalam Laporan Pembangunan Manusia 2004. Laporan ini memperkirakan berapa biaya yang diperlukan untuk menyediakan peluang yang sama bagi siswa laki-laki dan siswa perempuan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Kesimpulannya, pengeluaran ideal untuk murid Sekolah Dasar (SD) adalah Rp 1,17 juta pertahun dan untuk murid SMP dan SMA adalah Rp 2,28 juta pertahun.

Disamping untuk siswa kalkulasi untuk guru juga diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas guru melalui jenjang pendidikan dan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan sertifikasi guru. Berdasarkan laporan Balitbangda tentang Trend Anggaran Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2010 disebutkan bahwa biaya beasiswa untuk mencapai kualifikasi S1 sebesar Rp 3 juta pertahun perguru sedangkan biaya untuk kualifikasi S2 sebesar Rp 60 juta pertahun perguru. Selain jalur pendidikan formal, peningkatan kualitas guru juga dilakukan melalui program sertifikasi guru. Untuk melakukan pendidikan dan pelatihan sertifikasi diperlukan anggaran sebesar Rp 2 juta pertahun perguru.

Estimasi kebutuhan anggaran disamping memperhitungkan kebutuhan

siswa/murid dan guru juga memperhitungkan pembangunan fisik ruang kelas. Pembangunan fisik disini difokuskan pada rehab ruang kelas rusak ringan dan rusak berat. Berdasarkan peraturan Mendikbud dan Kementerian PU pembangunan sekolah baru sebesar Rp.2.750.000 per meterpersegi dengan ukuran kelas 7,5 meter x 8,5 meter. Rehab kelas rusak ringan dengan biaya sebesar Rp 825.000 per meterpersegi dengan kalkulasi 30 persen dan rehab berat dengan biaya sebesar sebesar Rp 1.787.500 per meterpersegi dengan kalkulasi 65 persen.

Estimasi perhitungan terakhir adalah memperhitungkan biaya kegiatan dan program. Maksudnya adalah belanja tidak langsung seperti gaji pegawai, pakaian dinas, administrasi kantor, diklat fungsional atau struktural pegawai dan sebagainya. Belanja langsung adalah belanja koordinasi, monitoring dan evaluasi, bangunan kantor, kendaraan dinas, sarana prasarana, pembangunan sekolah unggulan lokal seperti SMK, pendidikan khusus dan layanan khusus, sekolah inklusi dan sebagainya.

Sementara itu estimasi dana dari APBN berdasarkan Visi, Misi RKP dan Renstra Kemendikbud. Untuk merinci secara detail sangat kesulitan karena kebutuhan anggaran pemerintah pusat kepada daerah sangat fluktuatif sekali. Sehingga estimasi diperhitungkan berdasarkan trend anggaran selama 5 tahun terakhir, sementara rincian estimasi penggunaan anggaran melalui dana APBN tidak dapat ditampilkan. Anggaran yang berasal dari APBN ini ada kalanya berdasarkan hubungan dan jaringan yang dibentuk. Karena alokasi APBN biasanya untuk beberapa provinsi saja, sehingga siapa yang punya hubungan dan jaringan maka provinsi tersebut akan memperoleh alokasi APBN.

Untuk lebih jelasnya guna melihat kebutuhan-kebutuhan riil penggunaan anggaran pendidikan melalui dana APBD dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Estimasi Penggunaan Anggaran Pendidikan Melalui Dana APBD Tahun 2013-2020 (Rp juta).

Estimasi Untuk	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Murid/Siswa :								
SD	142.921	153.831	165.575	174.231	185.459	195.985	207.374	220.158
SMP	99.789	105.582	111.710	122.643	135.784	145.831	158.672	170.437
SMA	56.490	57.796	59.132	61.674	62.970	64.469	66.972	67.175
Peningkatan Jenjang dan Diklat Sertifikasi Guru	16.330	21.604	29.286	36.874	45.251	51.740	56.626	63.702
Rehab Ruang Kelas :								
Rusak Ringan	38.452	38.452	38.452	38.452	38.452	38.452	38.452	38.452
Rusak Berat	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051
Kegiatan dan Program :								
Tidak Langsung	19.815	45.367	83.661	95.500	116.927	138.902	160.571	182.219
Langsung	178.340	408.304	752.955	859.507	1.052.347	1.250.119	1.445.140	1.639.972
Jumlah	593.189	871.988	1.281.823	1.429.933	1.678.242	1.926.550	2.174.859	2.423.167

Sumber : *Disdik Prov. Jambi 2012 dan Lap. Pemb. Manusia 2004 (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa estimasi penggunaan anggaran yang paling tinggi adalah pada belanja kegiatan dan program. Belanja ini ada 2 kategori yaitu belanja tidak langsung untuk penggunaan belanja pegawai seperti gaji, honor dan sebagainya serta belanja langsung untuk penggunaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja kegiatan dan program menjadi terbesar karena juga menyangkut kewenangan yang ada pada Provinsi Jambi.

Estimasi penggunaan anggaran yang paling besar juga adalah untuk siswa SD, SMP dan SMA persiswa pertahun. Untuk siswa jenjang SD dibutuhkan anggaran sebesar Rp 142,941 milyar pada tahun 2013 dan mencapai Rp 220,158 milyar pada tahun 2020. Untuk siswa jenjang SMP dibutuhkan anggaran sebesar Rp 99,789 milyar pada tahun 2013 dan mencapai Rp 170,437 milyar pada tahun 2020 serta untuk siswa jenjang SMA dibutuhkan anggaran sebesar Rp 56,490 milyar pada tahun 2013 dan mencapai Rp 67,175 milyar pada tahun 2020.

Rehabilitasi ruang kelas sesuai dengan tabel 4. 5 kondisi ruang kelas pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2011 dimana selama 8 tahun diperlukan dana sebesar Rp 328.412.906.250 untuk

merehab ruang kelas rusak ringan dan rusak berat. Dengan demikian dibutuhkan dana Rp 38.542 milyar setiap tahun untuk merehab kelas rusak ringan dan Rp 41,051 milyar setiap tahun untuk merehab kelas rusak berat selama 8 tahun. Rehabilitasi ruang kelas selama 8 tahun ini dengan asumsi APBD tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekolah baru. Karena pembangunan sekolah baru diarahkan pada APBN dan APBD kabupaten/kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proporsi pendanaan pendidikan dalam APBD Provinsi Jambi belum pernah mencapai 20 persen. Hal ini terjadi karena ketergantungan anggaran yang masih tinggi terhadap APBN, komponen gaji guru dan pelatihan kedinasan tidak dimasukkan serta masih relatif rendahnya sumberdaya manusia bidang pendidikan.
2. Proporsi APBD pendidikan Provinsi Jambi terhadap APBN Dekon sudah cukup besar, hal ini terjadi karena adanya pengembalian uang gaji sertifikasi guru dari APBN Dekon kepada APBD kabupaten/kota, adanya

pengurangan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) semua jenjang, pengurangan jumlah penerima beasiswa serta terjadinya reformasi birokrasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Tingkat signifikansi hasil korelasi antara APBN/APBD dengan APK-SMP tidak signifikan, sedangkan tingkat korelasi/hubungan antara APBN/APBD dengan APM-SD dan APK-SMA signifikan.
4. Estimasi penggunaan anggaran pendidikan melalui dana APBD setiap tahun selama 8 tahun terbesar adalah untuk kegiatan dan program belanja langsung dan untuk siswa/murid SD, SMP dan SMA..

Saran

1. Perlu pengelolaan anggaran pendidikan secara efektif dan efisien dengan prinsip good and clean governance yang dikelola oleh pegawai dengan tenaga profesional.
2. Alokasi anggaran pendidikan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi yaitu pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan khusus dan layanan khusus, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) serta muatan lokal.
3. Anggaran pendidikan lebih difokuskan pada pendidikan vokasi dengan perbandingan 30 persen SMA : 70 persen SMK.
4. Penetapan kebijakan anggaran sudah saatnya berbasis hasil penelitian dan pengembangan pendidikan (Litbangdik).

DAFTAR PUSTAKA

BALITBANGDA Provinsi Jambi, 2010, Trend Anggaran Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2010

BAPPEDA Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010

BAPPENAS, 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Jakarta

BAPPENAS, BPS, UNDP, 2006, Ekonomi dari Demokrasi, Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia, Jakarta

BAPPENAS dan UNICEF, 2004, Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2004 BPS Provinsi Jambi, 2008, Statistik Pendidikan Provinsi Jambi.

Dakir, H, 2010, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, Rineka Cipta, Jakarta.

Idochi, Moch., Anwar. 2004. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan. Alfabeta. Bandung.

Mulyono, 2010, Konsep Pembiayaan Pendidikan, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta

Nanang Fattah, 2009, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Remaja Rosdakarya, pt, Bandung

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sudarman, Prof, DR, 2010, Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi, Alfabeta, Bandung

Tim Peneliti Balitbangda Provinsi Jambi, 2009, Laporan Kajian Peningkatan Akses Pendidikan dan Persiapan Wajar 12 Tahun di Provinsi Jambi